

Laporan Kegiatan Initiative!

Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

Tempat	Zoom
Hari / Tanggal	Kamis, 20 Juni 2024
Waktu	14.00-16.00 WIB
Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Christina Clarissa Intania - Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute 2. Dewi Rahmawati - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 3. Cucu Saidah - Disability Inclusion Advisor - Consultant
Moderator	Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	<i>Online</i>

Ringkasan Diskusi

Pada Kamis, 20 Juni 2024, dua peneliti dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan diseminasi hasil riset yang merupakan bagian dari asesmen tengah tahun TII yang bertajuk Policy Assessment 2024. Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum, dan Dewi Rahmawati, Peneliti Bidang Sosial, mempresentasikan temuan-temuan penting yang diperoleh dari penelitian mereka. Acara ini diadakan untuk membagikan informasi dan wawasan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan masyarakat sipil, diseminasi ini diharapkan dapat mendorong diskusi konstruktif dan kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Christina berfokus pada evaluasi dan mekanisme pendataan disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

Diskusi ini diawali dengan pemaparan Christina tentang hasil penelitiannya yang menemukan beberapa poin menarik. Pertama, dia mengungkapkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP, sebuah permasalahan mendasar yang menghambat akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan hak-hak sipil. Kedua, Christina menyoroti perspektif masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa penyandang disabilitas bukan merupakan bagian integral dari masyarakat, yang mengakibatkan marginalisasi sosial dan ekonomi bagi kelompok ini. Ketiga, dia juga membahas kesulitan geografis yang dihadapi saat melakukan kunjungan ke wilayah kepulauan, yang sering kali terisolasi dan sulit dijangkau, sehingga menghambat penyebaran informasi dan layanan pemerintah secara merata. Terakhir, Christina menyoroti masalah klasik dalam penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan pemilu, yang sering kali kurang efektif dan efisien, menimbulkan berbagai kendala administratif dan teknis dalam proses pemilu.

Adapun rekomendasi dari hasil riset ini adalah pertama, harmonisasi pembuatan kebijakan oleh Disdukcapil dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat memperoleh KTP dan hak-hak administratif lainnya tanpa hambatan. Kedua, perlu adanya posko dan pelayanan khusus di masing-masing daerah agar lebih dekat dengan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan tanpa harus menghadapi kesulitan geografis atau transportasi. Ketiga, perlunya kerjasama yang lebih masif antara KPU dan Bawaslu serta stakeholder pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan inklusif dan efisien, terutama dalam hal pencatatan pemilih dan penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan meningkatkan inklusi serta partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Paparan kemudian dilanjutkan oleh Dewi Rahmawati selaku Peneliti Bidang Sosial yang lebih menyoroti konteks partisipasi politik dari penyandang disabilitas dan bagaimana mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan bermakna. Dewi menekankan bahwa partisipasi politik adalah hak dasar yang harus dijamin bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam presentasinya, Dewi menjelaskan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pemilu, mulai dari aksesibilitas tempat pemungutan suara hingga ketersediaan informasi yang mudah dipahami.

Dewi kemudian mengajukan tiga rekomendasi umum untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Pertama adalah keberlanjutan program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan untuk penyandang disabilitas. Program-program ini harus dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak politik dan prosedur pemilu, serta memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan.

Kedua adalah meningkatkan pelatihan bagi petugas pemilu dan penyelenggara terkait. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani penyandang disabilitas dengan lebih baik, termasuk penanganan situasi khusus dan penggunaan alat bantu yang diperlukan.

Ketiga adalah transparansi serta akuntabilitas anggaran yang digunakan dalam program-program inklusi pemilu. Transparansi ini mencakup pelaporan yang jelas dan rinci mengenai alokasi dana serta penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya benar-benar dialokasikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, Dewi berharap dapat mendorong terciptanya lingkungan politik yang lebih inklusif dan ramah bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Bu Cucu Saidah kemudian menyampaikan tanggapan sekaligus perspektif dari sudut pandangnya. Menurutnya, pos anggaran pemilu seringkali tidak melibatkan kelompok disabilitas, yang mengakibatkan kurangnya fasilitas dan layanan yang memadai bagi mereka

selama proses pemilu. Ia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lebih aktif dari KPU dan Bawaslu dalam menyusun anggaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Bu Cucu juga menekankan bahwa KPU dan Bawaslu seharusnya lebih banyak melakukan survei dan kajian lapangan untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pemilu. Survei ini tidak hanya akan membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka, tetapi juga memberikan data yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Dengan melakukan survei yang komprehensif, kualitas penyelenggaraan pemilu dapat ditingkatkan, sehingga semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses demokrasi.

Selain itu, menurut Bu Cucu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dalam konteks pendekatan pada hari pencoblosan. Ia menyoroti bahwa upaya ini belum dilakukan secara komprehensif di semua daerah, yang berakibat pada minimnya fasilitas dan layanan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan guna memastikan bahwa semua tempat pemungutan suara memenuhi standar aksesibilitas yang memadai.

Bu Cucu juga menegaskan bahwa partai politik harus memastikan inklusivitas dalam setiap kegiatan kampanye dan sosialisasi mereka. Hal ini meliputi penggunaan materi kampanye yang mudah diakses, seperti brosur dalam format braille, video dengan subtitle, dan penyediaan penerjemah bahasa isyarat. Partai politik juga perlu melibatkan penyandang disabilitas dalam tim kampanye dan memperhatikan kebutuhan khusus mereka dalam setiap aspek kegiatan politik. Dengan demikian, diharapkan semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari demokrasi yang inklusif dan adil.

Refleksi

Refleksi atas paparan dan diskusi yang berlangsung pada acara diseminasi hasil riset The Indonesian Institute bertajuk Policy Assessment 2024 menyoroti berbagai tantangan dan rekomendasi terkait inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam konteks hukum dan sosial, terutama dalam partisipasi politik.

Christina Clarissa Intania mengidentifikasi beberapa isu kritis, termasuk rendahnya kepemilikan KTP di kalangan penyandang disabilitas, pandangan masyarakat yang kurang inklusif, kesulitan geografis, dan masalah teknologi informasi dalam pencatatan pemilih. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan dan pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak sipil mereka sepenuhnya.

Dewi Rahmawati menyoroti pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Ia menekankan kebutuhan akan program sosialisasi yang berkelanjutan, pelatihan bagi petugas pemilu, dan transparansi serta akuntabilitas anggaran.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi tanpa hambatan yang berarti.

Tanggapan dari Bu Cucu Saidah menambah dimensi penting dengan menggarisbawahi kurangnya perhatian pada kelompok disabilitas dalam penganggaran pemilu dan pentingnya survei serta kajian oleh KPU dan Bawaslu. Ia juga menekankan perlunya pengawasan pada hari pencoblosan dan memastikan inklusivitas dalam kampanye partai politik.

Secara keseluruhan, diskusi ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya inklusivitas dalam kebijakan publik dan proses demokrasi. Tantangan-tantangan yang diidentifikasi menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan yang perlu diatasi untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar inklusif. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan para peneliti dan tanggapan dari Bu Cucu memberikan panduan konkret bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan partai politik untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dan inklusif. Harapannya, dengan implementasi yang tepat, inklusi sosial dan politik bagi penyandang disabilitas dapat tercapai, memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.